

Evaluasi Implementasi Standar Penilaian Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman

Nanik Dwi Setya Wati¹, Nabila Salsabil², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674205@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674190@mhs.unesa.ac.id², firresuprpto@unesa.ac.id³, indahprabawati@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 05 Mei 2026

Revised: 21 Juni 2026

Accepted: 07 Juli 2026

Keywords:

Standar Penilaian, Implementasi Kebijakan, Mutu Pendidikan, Asesmen Autentik, Studi Literatur.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Standar Penilaian berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 serta menganalisis implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara prinsip-prinsip penilaian dalam regulasi, seperti autentik, objektif, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan praktik penilaian yang berlangsung di satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari regulasi pemerintah, laporan resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dokumen implementasi Kurikulum Merdeka, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan content analysis dengan mengkaji faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III serta Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar penilaian di Kabupaten Sleman telah berjalan secara bertahap menuju asesmen yang lebih autentik melalui penilaian proyek, portofolio, dan asesmen formatif. Namun, masih terdapat policy gap antara tuntutan kebijakan dan praktik di lapangan, ditandai dengan dominasi penilaian tradisional, keterbatasan pemahaman guru, ketimpangan fasilitas antarsekolah, serta belum optimalnya supervisi akademik. Meskipun demikian, penerapan standar penilaian memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada capaian literasi dan numerasi peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan kompetensi guru, pemerataan sumber daya, penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, serta monitoring berkelanjutan agar

tujuan penilaian yang objektif dan akuntabel dapat tercapai secara optimal.

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana penilaian dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan. Penilaian tidak hanya bertujuan menggambarkan capaian akademik peserta didik, tetapi juga menjadi dasar bagi perbaikan pembelajaran, penyusunan intervensi belajar, serta pengambilan keputusan di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah. Dalam konteks transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 yang menetapkan standar penilaian sebagai pedoman bagi pendidik untuk menerapkan asesmen yang autentik, objektif, berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi ini mendorong perubahan paradigma penilaian dari sekadar pengukuran hasil akhir menuju instrumen yang memberi umpan balik bermakna dan mampu mencerminkan kompetensi esensial peserta didik.

Di Kabupaten Sleman, kebijakan ini diterapkan seiring dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang diadopsi secara bertahap pada berbagai jenjang pendidikan. Berbagai sekolah telah mulai mengembangkan asesmen autentik melalui proyek, portofolio, observasi, kinerja, dan refleksi belajar. Namun, implementasinya belum merata. Masih terdapat variasi kualitas instrumen penilaian, perbedaan pemahaman guru, serta ketimpangan dukungan sarana yang menyebabkan sebagian sekolah tetap bergantung pada penilaian tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan praktik faktual di lapangan (policy gap), yang sering kali muncul akibat keterbatasan kapasitas guru, lemahnya sosialisasi teknis, serta belum optimalnya supervisi akademik di tingkat sekolah.

Isu ini menjadi persoalan publik karena ketidaktepatan penilaian akan menghasilkan informasi belajar yang kurang akurat dan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan. Ketika standar penilaian tidak diimplementasikan secara konsisten, maka proses pengambilan keputusan berbasis data, perbaikan pembelajaran, dan evaluasi perkembangan peserta didik menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi yang lebih komprehensif melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, serta penyediaan perangkat asesmen yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama:

1. bagaimana implementasi standar penilaian berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 di Kabupaten Sleman? dan
2. bagaimana implikasi penerapannya terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan penilaian dilaksanakan sesuai regulasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya, serta menilai dampaknya terhadap mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi Standar Penilaian pada Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tanpa melakukan intervensi langsung ke lapangan. Sebagai sebuah kajian kebijakan, fokus penelitian terletak pada penafsiran, pengumpulan, dan analisis data yang telah terdokumentasi secara resmi.

Pendekatan studi literatur dipandang paling relevan karena memungkinkan peneliti menelaah keterkaitan antara norma kebijakan, kondisi empirik, serta hasil pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui dokumen yang kredibel dan terverifikasi. Pemilihan pendekatan ini juga sesuai dengan karakter penelitian yang bertujuan menghasilkan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan pendidikan tanpa menitikberatkan pada pengukuran perilaku individual di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari regulasi pemerintah, pedoman teknis penilaian, laporan resmi implementasi kurikulum, publikasi lembaga pemerintah daerah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi standar penilaian dan mutu pendidikan. Salah satu data yang digunakan adalah capaian pendidikan Kabupaten Sleman yang tercantum dalam laporan resmi pemerintah daerah, yang menunjukkan indikator literasi dan numerasi pada jenjang SMP. Data-data tersebut diposisikan sebagai bahan validasi awal untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara standar kebijakan dan hasil pelaksanaan di satuan pendidikan.

Proses analisis data dilakukan secara analisis isi (content analysis) dengan tahapan yang terstruktur. Pertama, peneliti melakukan seleksi dan verifikasi dokumen untuk memastikan relevansi dan keabsahan sumber. Kedua, peneliti melakukan kategorisasi informasi berdasarkan prinsip-prinsip standar penilaian dalam regulasi, seperti autentik, objektif, transparan, dan berkelanjutan. Ketiga, dilakukan analisis tematik untuk menelusuri pola implementasi, kendala pelaksanaan, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Seluruh temuan kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kondisi implementasi di Kabupaten Sleman. Pendekatan analitis ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga melakukan penilaian kritis terhadap efektivitas kebijakan serta relevansinya dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi kajian karena merupakan salah satu daerah dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang progresif di Daerah Istiewa Yogyakarta serta memiliki data pendidikan yang relatif lengkap, khususnya terkait capaian literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Sleman menunjukkan dinamika implementasi standar penilaian yang relevan untuk dianalisis dalam konteks evaluasi kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standar Penilaian berdasarkan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya perubahan bertahap menuju sistem penilaian yang lebih autentik, objektif, transparan, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 menegaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik harus dilaksanakan melalui penilaian formatif dan sumatif yang berorientasi pada pemantauan proses belajar, pemberian umpan balik, serta penguatan capaian pembelajaran, bukan hanya penentuan nilai akhir semata. Selain itu, penilaian juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan dilakukan secara berkeadilan, objektif, serta edukatif.

Di Kabupaten Sleman, implementasi kebijakan ini berjalan seiring dengan penguatan Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap pada berbagai jenjang pendidikan. Beberapa sekolah, khususnya sekolah negeri di wilayah pusat kecamatan, telah mulai menerapkan asesmen autentik seperti penilaian proyek, portofolio, presentasi, observasi kinerja, dan refleksi belajar siswa. Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta kemampuan kolaboratif peserta didik. Namun demikian, implementasi ini belum berjalan merata di seluruh sekolah. Sebagian besar guru masih cenderung menggunakan tes tertulis konvensional karena dianggap lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan

kebiasaan lama dalam proses evaluasi pembelajaran.

Kondisi ini menunjukkan adanya policy gap antara substansi kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, Permendikbudristek menuntut asesmen yang komprehensif dan berkelanjutan, tetapi pada praktiknya guru masih menghadapi berbagai kendala teknis dalam menerapkan penilaian autentik. Gap kebijakan ini terjadi karena perubahan paradigma penilaian tidak hanya membutuhkan regulasi formal, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, dan perubahan budaya kerja di lingkungan sekolah. Sari (2020) menjelaskan bahwa asesmen autentik menuntut kompetensi pedagogis yang lebih tinggi karena guru harus mampu merancang rubrik, melakukan observasi sistematis, dan memberikan umpan balik yang bermakna kepada peserta didik. Ketika kapasitas tersebut belum merata, maka implementasi kebijakan menjadi tidak optimal.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III, faktor komunikasi menjadi unsur utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan standar penilaian. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui pelatihan Kurikulum Merdeka, workshop asesmen, dan pendampingan sekolah. Namun, efektivitas komunikasi kebijakan belum sepenuhnya merata. Guru di sekolah pinggiran masih mengalami kesulitan memahami perbedaan teknis antara asesmen formatif dan sumatif, serta belum memiliki contoh instrumen operasional yang jelas. Banyak guru memahami konsep asesmen autentik secara teoritis, tetapi belum mampu menerapkannya secara sistematis dalam proses pembelajaran sehari-hari.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Utami (2021) yang menunjukkan bahwa lemahnya sosialisasi dan kurangnya contoh instrumen konkret menyebabkan guru mengalami ambiguitas dalam memahami implementasi penilaian formatif pada Kurikulum Merdeka. Komunikasi kebijakan yang bersifat top-down dan terlalu normatif sering kali menyebabkan guru hanya memahami kebijakan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran. Dalam konteks ini, masalah implementasi bukan terletak pada keberadaan regulasi, melainkan pada kualitas transmisi informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di tingkat sekolah.

Selain komunikasi, faktor sumber daya juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan. Sekolah yang memiliki fasilitas teknologi memadai cenderung lebih siap menerapkan asesmen berbasis proyek dan portofolio digital. Guru dapat memanfaatkan platform pembelajaran digital, aplikasi penilaian, dan sistem dokumentasi hasil belajar yang lebih sistematis. Sebaliknya, sekolah yang berada di wilayah pinggiran masih menghadapi keterbatasan perangkat teknologi, akses internet yang tidak stabil, serta beban kerja administratif yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan guru sulit menyusun instrumen autentik secara optimal karena membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan penilaian tradisional.

Penelitian Wulandari (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi asesmen berbasis kinerja. Guru yang tidak memiliki dukungan sarana cenderung kembali menggunakan metode evaluasi konvensional karena dianggap lebih realistis dalam kondisi keterbatasan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi standar penilaian tidak dapat hanya dibebankan pada kapasitas guru, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dan sekolah sebagai organisasi pelaksana.

Dari aspek disposisi implementor, terdapat perbedaan sikap yang cukup signifikan di antara guru. Sebagian guru memandang asesmen autentik sebagai inovasi positif karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap perkembangan peserta didik. Mereka melihat

bahwa penilaian berbasis proyek dan refleksi belajar lebih relevan dengan tujuan pembelajaran abad ke-21. Namun, sebagian guru lainnya menganggap perubahan ini sebagai tambahan beban kerja yang kompleks, terutama karena harus menyusun rubrik, melakukan observasi individual, dan membuat laporan deskriptif yang lebih rinci.

Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap, motivasi, dan kesiapan pelaksana kebijakan. Ketika implementor tidak memiliki keyakinan terhadap efektivitas kebijakan, maka proses implementasi cenderung berjalan secara formalitas semata. Penelitian Ismail (2020) juga menegaskan bahwa kesiapan psikologis guru sangat menentukan keberhasilan perubahan sistem penilaian. Guru yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan dukungan pelatihan berkelanjutan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan dibandingkan guru yang hanya menerima instruksi administratif tanpa pendampingan intensif.

Struktur birokrasi sekolah juga menjadi faktor penting dalam menjamin konsistensi implementasi. Sekolah yang memiliki kepemimpinan kuat dari kepala sekolah dan wakil kurikulum cenderung menjalankan supervisi akademik secara lebih sistematis. Bentuk supervisi tersebut meliputi pemeriksaan instrumen penilaian, observasi kelas, pendampingan penyusunan rubrik, serta evaluasi berkala terhadap hasil asesmen guru. Supervisi yang konsisten membantu guru menjaga kualitas implementasi standar penilaian dan mengurangi penyimpangan praktik evaluasi.

Sebaliknya, sekolah yang memiliki kapasitas manajerial rendah sering kali menyerahkan sepenuhnya proses penilaian kepada masing-masing guru tanpa pengawasan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan variasi kualitas penilaian antarguru menjadi sangat tinggi dan berpotensi menurunkan akuntabilitas pendidikan. Arifin (2018) menegaskan bahwa supervisi akademik merupakan instrumen penting dalam memastikan kebijakan pendidikan tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di tingkat satuan pendidikan.

Dari sisi dampak kebijakan, implementasi standar penilaian menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman, khususnya pada capaian literasi dan numerasi. Laporan pendidikan daerah menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa satuan pendidikan setelah penerapan Kurikulum Merdeka dan penguatan asesmen formatif. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penilaian yang lebih terstruktur dan berorientasi pada proses belajar mampu membantu guru mengidentifikasi kesulitan belajar siswa lebih awal dan memberikan intervensi yang lebih tepat.

Darling-Hammond (2018) menjelaskan bahwa asesmen autentik berkontribusi pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi ketika digunakan secara konsisten dalam pembelajaran. Penilaian tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat seleksi akademik, tetapi menjadi instrumen refleksi belajar yang memperkuat kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Namun demikian, peningkatan mutu pendidikan di Sleman belum dapat sepenuhnya dikaitkan hanya dengan standar penilaian, karena masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kualitas kepemimpinan sekolah, dukungan orang tua, lingkungan sosial, dan pemerataan kualitas guru.

Dengan demikian, implementasi standar penilaian di Kabupaten Sleman merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Kebijakan ini telah memberikan arah yang positif bagi penguatan mutu pendidikan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, sikap implementor, dan kekuatan birokrasi sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak cukup hanya melalui regulasi formal, tetapi membutuhkan intervensi berkelanjutan berupa pelatihan intensif, pemerataan fasilitas, penguatan supervisi

akademik, serta sistem monitoring berbasis data yang mampu memastikan bahwa tujuan kebijakan benar-benar tercapai secara merata di seluruh satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Standar Penilaian sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 di Kabupaten Sleman masih berada dalam tahap transisi menuju penerapan asesmen yang autentik, objektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai arah Kurikulum Merdeka. Meskipun sebagian sekolah telah mampu menerapkan penilaian formatif, asesmen berbasis kinerja, dan portofolio secara lebih sistematis, pelaksanaan tersebut belum berlangsung merata. Kesenjangan ini menunjukkan adanya policy implementation gap antara tuntutan regulasi dengan kapasitas pelaksana di tingkat satuan pendidikan.

Penelitian menemukan bahwa kualitas pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan penilaian autentik sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dan pelatihan yang diikuti. Sosialisasi yang masih bersifat umum membuat sebagian guru memiliki interpretasi berbeda terkait penerapan standar penilaian, sehingga praktik asesmen di kelas menjadi tidak seragam. Faktor ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan merupakan unsur krusial dalam memastikan pemahaman implementor.

Selain aspek kompetensi, kesiapan sumber daya antarsekolah turut menentukan efektivitas implementasi. Sekolah dengan fasilitas teknologi memadai lebih siap mengintegrasikan platform digital untuk asesmen formatif dan portofolio, sedangkan sekolah dengan infrastruktur terbatas cenderung tetap menggunakan metode evaluasi tradisional. Kesenjangan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru, tetapi juga bergantung pada kondisi sarana, dukungan teknis, dan konteks geografis sekolah.

Perbedaan sikap profesional guru juga berkontribusi pada variasi kualitas penilaian. Sebagian guru menerima kebijakan sebagai upaya positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran, namun sebagian lainnya merasakan beban kerja tambahan akibat tuntutan penyusunan instrumen yang lebih kompleks. Sikap implementor yang beragam ini menjadi faktor penting sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan, di mana penerimaan dan motivasi pelaksana memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi sekolah, terutama kekuatan supervisi akademik, turut menentukan keberhasilan penerapan standar penilaian. Sekolah dengan manajemen kuat mampu melakukan supervisi yang terarah, memberikan umpan balik, serta menjaga mutu instrumen penilaian. Sebaliknya, sekolah dengan supervisi yang lemah menunjukkan variasi praktik asesmen yang lebih tinggi karena minimnya kontrol mutu internal.

Secara keseluruhan, standar penilaian memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sleman, ditunjukkan melalui peningkatan capaian literasi dan numerasi di beberapa sekolah. Namun peningkatan tersebut belum merata, sehingga efektivitas kebijakan belum optimal. Dengan demikian, implementasi standar penilaian membutuhkan penguatan menyeluruh melalui kompetensi guru, pemerataan fasilitas, supervisi akademik yang konsisten, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, sejumlah rekomendasi strategis perlu diterapkan untuk memperkuat implementasi Standar Penilaian di Kabupaten Sleman. Salah satu aspek utama adalah penguatan kompetensi guru, mengingat kualitas asesmen sangat bergantung pada kemampuan pendidik dalam memahami prinsip, teknik, dan penerapan penilaian autentik. Pemerintah daerah

perlu memperluas pelatihan teknis yang bersifat praktik langsung, bukan sekadar penyampaian teori. Pelatihan seperti simulasi penyusunan rubrik, analisis contoh proyek, dan demonstrasi penilaian formatif akan memberikan pengalaman konkret bagi guru dalam memecahkan persoalan nyata yang mereka hadapi di kelas. Dengan pendekatan yang berorientasi pada problem solving, guru tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terampil dalam mengaplikasikannya secara konsisten.

Selain pelatihan, pendampingan berkelanjutan di sekolah menjadi faktor penting untuk memastikan keterampilan yang diperoleh guru benar-benar terinternalisasi. Program pendampingan yang dilakukan secara periodik oleh pengawas, instruktur, atau sekolah penggerak dapat memberikan ruang bagi guru untuk berkonsultasi terkait penyusunan instrumen yang lebih kompleks, seperti penilaian proyek dan penilaian kinerja. Melalui pendampingan langsung, guru juga dapat berdiskusi mengenai hasil asesmen dan melakukan refleksi bersama mengenai efektivitas instrumen yang digunakan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas penilaian, tetapi juga membangun budaya evaluasi diri yang positif di lingkungan sekolah.

Di samping penguatan kapasitas guru, pemerataan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi kebutuhan mendesak. Banyak sekolah, khususnya di wilayah pinggiran, menghadapi keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet yang stabil, sehingga menghambat penerapan asesmen digital yang kini menjadi salah satu tuntutan regulasi. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penyediaan perangkat pendukung serta peningkatan layanan internet agar pelaksanaan penilaian berbasis teknologi dapat berjalan optimal. Selain itu, tenaga administrasi sekolah juga perlu diperkuat melalui pelatihan khusus agar pengelolaan data penilaian menjadi lebih sistematis, akurat, dan mendukung analisis mutu secara menyeluruh.

Rekomendasi selanjutnya berkaitan dengan penguatan supervisi akademik. Kepala sekolah dan pengawas memiliki peran strategis sebagai penjamin mutu pelaksanaan penilaian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme supervisi yang lebih terstruktur, mencakup pemeriksaan instrumen penilaian, observasi langsung terhadap proses asesmen di kelas, hingga evaluasi kualitas umpan balik yang diberikan guru kepada siswa. Supervisi yang konsisten dan komprehensif akan membantu menjaga keselarasan implementasi standar di seluruh sekolah serta mendorong guru untuk terus meningkatkan kualitas asesmen yang mereka lakukan.

Selain supervisi, penyusunan pedoman teknis operasional juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Regulasi nasional sering kali memberikan kerangka umum, sehingga pemerintah daerah perlu menyusun pedoman turunan yang lebih detail dan aplikatif. Pedoman tersebut sebaiknya memuat contoh rubrik, format asesmen formatif, contoh proyek, panduan pelaporan, dan berbagai model praktik baik yang dapat diadaptasi oleh guru. Keberadaan pedoman teknis akan membantu mengurangi ambiguitas dalam implementasi serta mempermudah guru dalam memahami standar yang harus dicapai.

Akhirnya, pengembangan sistem monitoring berbasis data merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi Standar Penilaian. Monitoring dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data penilaian dari masing-masing sekolah, sehingga pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan secara lebih akurat. Sistem ini memungkinkan pemetaan capaian belajar, melihat konsistensi antar sekolah, serta merumuskan intervensi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Dengan monitoring yang kuat, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Arifin, Z. (2018). Supervisi akademik dalam peningkatan mutu pembelajaran. *Jurnal Administrasi*

-
- Pendidikan*, 25(2), 145–158. <https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.12480>
- Darling-Hammond, L. (2018). Performance assessment and authentic learning. *Stanford Center for Opportunity Policy in Education*. <https://edpolicy.stanford.edu>
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. (2023). Laporan capaian literasi dan numerasi Kabupaten Sleman 2023. <https://disdik.slemankab.go.id>
- Ismail, F. (2020). Pengaruh kesiapan guru terhadap implementasi penilaian pada kurikulum baru. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(1), 55–68. <https://doi.org/10.21009/jep.011.05>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224425/permendikbudristek-no-21-tahun-2022>
- Peraturan.go.id. (2022). Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. <https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-21-tahun-2022>
- Putra, A. R. (2021). Implementasi asesmen autentik dalam pembelajaran abad 21. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(3), 203–214. <http://dx.doi.org/10.22236/jip.v8i3.6432>
- Sari, M. P. (2020). Tantangan guru dalam menerapkan penilaian autentik pada Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 112–123. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v6i2.14567>
- Utami, R. (2021). Pemahaman guru terhadap asesmen formatif pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Penilaian Pendidikan Indonesia*, 4(1), 44–57. <https://doi.org/10.23887/jppi.v4i1.31009>
- Wibowo, T. (2021). Analisis implementasi kebijakan penilaian pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 9(2), 87–99. <https://doi.org/10.31851/jkmp.v9i2.52177>
- Wulandari, S. (2022). Kesenjangan infrastruktur digital dalam pelaksanaan asesmen di sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Nusantara*, 10(1), 33–46. <https://doi.org/10.33369/jtpn.v10i1.18725>